

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PPKn BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS :  
STUDI TENTANG PEMBELAJARAN PPKn PADA KELAS VIII TUNAGRAHITA SMPLB-C SLB NEGERI  
GEDANGAN-SIDOARJO**

**Anna Lutfaidah**

12040254055 (PPKn FISH UNESA) Anna.lutfaidah31@gmail.com

**I Made Suwanda**

0009075708 (PPKn FISH UNESA) madesuwanda@gmail.com

**Abstrak**

Pembelajaran PPKn merupakan pembelajaran kewarganegaraan yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah dan pihak sekolah untuk memberi pembelajaran kewarganegaraan kepada siswa sesuai dengan keadaan yang dimiliki siswanya, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu ABK berhak mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana yang didapatkan oleh anak normal pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mengambil lokasi di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo. Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran kelas VIII Tunagrahita dan siswa tunagrahita kelas VIII. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPKn, upaya dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn, dan solusi dalam mengatasi hambatan pembelajaran PPKn pada anak tunagrahita kelas VIII SMPLB-C di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori belajar kognitivisme Jean Piaget. Dalam proses belajar individu memerlukan kerja sama pada seluruh inderanya untuk berinteraksi dengan lingkungannya sebagai pembentuk makna dan arti yang benar ketika mempresepsikan sesuatu. Pelaksanaan pembelajaran PPKn diawali dengan langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran melalui penyusunan program yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang bersangkutan. Pelaksanaan pembelajaran PPKn bagi tunagrahita diberi pelayanan secara individu yaitu tunagrahita sering didekati dan diberi pertanyaan agar siswa mendapat stimulus terus menerus sehingga siswa ABK akan cepat paham terhadap pelajaran.

**Kata Kunci :** Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Pembelajaran PPKn

**Abstract**

PPKn is a learning of citizenship is being taught at every level of education. It has become the duty of the Government and the school to give citizenship to students learning in accordance with the State owned their students, either in normal children as well as children in need special. Therefore her deserve the education service as a normal child obtained in General. This research uses a descriptive method in SLB Negeri Gedangan- Sidoarjo. The subjects in this study is the teacher of class VIII subjects mental retardation mental retardation and the students of class VIII. The goal in this research is to know how the implementation of PPKn learning, effort and obstacles in the implementation of PPKn, and learning solutions in overcoming barriers to learning PPKn in children tunagrahita VIII-C class SMPLB in SLB Negeri Gedangan- Sidoarjo. This research uses theories of learning kognitivisme Jean Piaget. In the individual learning process requires cooperation on the whole sensory-to interact with its environment as a shaper of meaning and the meaning of true when mempresepsikan something. The implementation of PPKn begins with learning the steps for preparing the planning of learning through the preparation of programs tailored to the needs of the learners concerned. Implementation of the learning PPKn for mental retardation services are given individually i.e. mental retardation often approached and given questions so that students get a continuous stimulus so that students will understand quickly against her lessons.

**Keywords:** Children In Need Special (ABK), Learning PPKn

**PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Adapun pendidikan menurut Durkheim (dalam George Ritzer & Douglas J Godman, 2009:115) “pendidikan adalah proses dimana individu mendapatkan alat-alat fisik, intelektual

dan moral yang diperlukan agar dapat berperan dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasannya pendidikan membekali bagi setiap peserta didik agar dapat maju dan memiliki kepribadian yang tanggung jawab, mandiri, kreatif serta berakhlak mulia”.

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan sendiri merupakan bentuk bimbingan dari orang dewasa terhadap perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak dapat secara mandiri melaksanakan tugas hidupnya sendiri (mandiri) tanpa bantuan orang lain. Pendidikan merupakan hal awal yang sangat penting untuk kehidupan anak, pendidikan merupakan awal dimana seorang anak belajar membaca, melatih kemampuan berhitung dan berpikir dengan baik. Saat ini pendidikan di bangku sekolah dapat dinikmati dan ditempuh oleh siapapun dari berbagai kalangan dan golongan manapun. Berbagai sekolah didirikan sebagai tempat atau sarana pendidikan bagi anak-anak yang ingin memperoleh pendidikan, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dimaknai dengan anak-anak yang menyandang ketunaan dan berbakat. Dalam perkembangannya, konsep ketunaan kini berubah menjadi berkelainan (*exception*) atau luar biasa. Konsep dari ketunaan itu sendiri berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan hanya berkenaan dengan kecacatan, sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang dikaruniai keunggulan.

Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda. SLB ini merupakan salah satu program pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya sekolah khusus dan pendidikan inklusi/khusus untuk anak ABK, tidak akan tercipta lagi kesenjangan pendidikan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus.

Adanya SLB ini, ditujukan agar para ABK mendapat fasilitas pendukung pendidikan layaknya anak normal pada umumnya. Salah satu SLB yang didirikan pemerintah sebagai sarana pendidikan ABK adalah SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo. SLB ini merupakan satu dari dua SLB Negeri yang didirikan pemerintah di sepanjang jalur Pantura, SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo memiliki jenjang sekolah terlengkap yang ada. Jenjang sekolah yang ada pada SLB ini dimulai dari jenjang pendidikan

TK sampai dengan SMA, dengan kelas mulai dari SLB A (untuk tuna netra) sampai SLB D (untuk tuna daksa).

Para siswa ABK ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (*barier to learning and development*). Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dalam pasal 5 ayat 2 juga menyebutkan bahwa “Setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, sosial, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Hak terhadap anak difabel sendiri, telah diatur pada UU No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 1 yang menegaskan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Negara juga menjamin hak bersekolah ABK pada sekolah reguler maupun khusus. Seperti yang tertera pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Pembelajaran untuk Anak Berkebutuhan Khusus (*student with special needs*) membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Model pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang dipersiapkan oleh guru di sekolah, ditujukan agar peserta didik mampu berinteraksi terhadap lingkungan sosial. Pembelajaran tersebut disusun secara khusus melalui penggalian kemampuan diri peserta didik yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi.

Kompetensi ini terdiri atas empat ranah yang perlu diukur meliputi kompetensi fisik, kompetensi afektif, kompetensi sehari-hari, dan kompetensi akademik. Pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak yang normal. Perbedaan ini bukan pada materi pokoknya melainkan pada segi luasnya dan pengembangan materi yang disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut.

Sehingga dalam pembelajaran kurikulum yang digunakan SLB adalah kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya sehingga menjadi kurikulum khusus untuk ABK menjadi kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus. Dengan adanya manajemen pembelajaran yang tepat, maka diharapkan mereka akan mendapatkan sejumlah pengalaman baru yang kelak dapat dikembangkan anak guna melengkapi bekal hidup.

Dalam pendidikan yang diberikan untuk ABK, terdapat mata pelajaran khusus (pelajaran sesuai kebutuhan ABK) dan mata pelajaran umum (pelajaran pelengkap). Salah satu dari mata pelajaran umum yang diberikan kepada ABK adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam melaksanakan pendidikannya, ABK tidak cukup hanya dengan memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan (ketunaannya), mereka juga memerlukan mata pelajaran pendamping (mata pelajaran umum) sebagai bekal untuk mereka menjalani kehidupannya ditengah masyarakat. Disinilah pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan moral perlu diberikan sebagai bekal ABK dalam melaksanakan perannya sebagai warga negara yang baik, meskipun mereka mengalami keterbatasan.

Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dijadikan bahan dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Para pendiri negara (*the founding fathers*) mengemukakan tiga tantangan yang harus dihadapi, yaitu mendirikan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, membangun bangsa, serta membangun karakter. Ketiga hal tersebut tampak jelas dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 Alinea 4.

Amanah UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa negara dan pemerintahan bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum, meliputi memajukan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan, yaitu memakmurkan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lain-lain. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermakna membangun peradaban bangsa dengan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua anak dari usia dini hingga dewasa. Pendidikan yang dimaksud bukan semata untuk meningkatkan kecerdasan intelektual tapi juga untuk pembinaan karakter dan moral.

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang relatif mengalami hambatan dalam perkembangannya maupun dalam memperoleh karier. Karena itu anak yang berkebutuhan khusus perlu mendapatkan pelayanan pendidikan yang khusus. Pendidikan bagi penyandang kelainan atau ketunaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 32, disebutkan bahwa "Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial" (Pasal 32).

Aturan tersebut bagi anak penyandang kelainan sangat berarti, karena memberikan landasan yang kuat

bahwa mereka perlu memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainnya untuk memperoleh pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang sama pada anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, berarti memperkecil kesenjangan pendidikan antara anak normal dengan anak berkelainan. Disamping secara psikologis akan berpengaruh pada tumbuhnya keinginan berprestasi dan meningkatnya kepercayaan diri pada anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus.

Dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan pada anak berkebutuhan khusus atau anak berkelainan dimaksudkan antara lain agar anak mempunyai wawasan kebangsaan, mengetahui hak dan kewajibannya pada bangsa dan negaranya. Mengetahui bagaimana karakteristik warga dan wilayah bangsa serta negaranya dengan baik. Nantinya merekapun akan mempunyai rasa nasionalis dan patriotisme layaknya anak normal lainnya.

Dalam praktek pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan oleh guru dan sekolah tentunya bukan hal mudah dalam pelaksanaannya. Mengingat peserta didik yang diajar adalah anak-anak berkebutuhan khusus, yang memiliki proses pembelajaran berbeda dengan anak reguler/normal pada umumnya. Disamping itu proses pembelajaran tiap-tiap anak ABK pun memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan tiap-tiap ABK memiliki ketunaan dengan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu maka setiap anak ABK memiliki metode, teknik dan strategi belajar mengajar yang berbeda satu sama lain tergantung ketunaan dan kebutuhan mereka.

Guru yang merupakan orang terdekat kedua setelah orang tua di rumah memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian Pendidikan Kewarganegaraan pada ABK. Selain menjadi seorang pendidik, guru juga menjadi orang tua kedua bagi peserta didik ketika di sekolah. Peran seorang pendidik dalam pendidikan adalah mengarahkan peserta didik sesuai potensi dan bakat yang dimilikinya. Seorang guru ABK lebih ditekankan pada kemampuannya dalam mengelola kelas dan menyampaikan materi pembelajarannya saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga, guru ABK harus memiliki kompetensi mengelola pembelajaran, pemahaman dan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Seorang pendidik ABK juga harus mampu membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan dengan berbagai media. Guru ABK harus mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga ABK dapat menerima dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam praktek pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan oleh guru dan sekolah tentunya bukan hal mudah dalam pelaksanaannya.



Mengingat peserta didik yang diajar adalah anak-anak berkebutuhan khusus, yang memiliki proses pembelajaran berbeda dengan anak reguler/normal pada umumnya. Disamping itu proses pembelajaran tiap-tiap anak ABK pun memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan tiap-tiap ABK memiliki ketunaan dengan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu maka setiap anak ABK memiliki metode, teknik dan strategi belajar mengajar yang berbeda satu sama lain tergantung ketunaan dan kebutuhan mereka.

Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Rustaman, 2001:461).

Menurut pendapat Bafadal (2005:11), pembelajaran dapat diartikan sebagai “Segala usaha atau proses belajar mengajar dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien”. Sejalan dengan itu, Jogiyanto (2007:12) juga berpendapat bahwa pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi suatu situasi yang dihadapi dan karakteristik-karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan berdasarkan kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan-perubahan sementara.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Winkel (1991:200) “Proses pembelajaran adalah suatu aktivitas psikis atau mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap”.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi, dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif, yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sebuah proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu.

Sedangkan pemberian pembelajaran PPKn atau pendidikan kewarganegaraan merupakan hak ABK untuk memahami lebih jauh negara dan bangsanya. Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan Kewarganegaraan, dijadikan bahan dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing *civic education* atau *citizenship education*. Terhadap dua istilah ini, John C. Cogan telah membedakan dengan mengartikan *civic education* sebagai “...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives” (Cogan, 1999:4), atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Sedangkan *citizenship education* digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media (Cogan, 1999:4).

Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa istilah *citizenship education* lebih luas cakupan pengertiannya daripada *civic education*. Dengan cakupan yang luas ini maka *citizenship education* di dalamnya meliputi pendidikan kewarganegaraan, dalam arti khusus (*civic education*). *Citizenship education* sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga Negara muda yang paham akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui persekolahan.

Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa istilah *citizenship education* lebih luas cakupan pengertiannya daripada *civic education*. Dengan cakupan yang luas ini maka *citizenship education* di dalamnya meliputi pendidikan kewarganegaraan, dalam arti khusus (*civic education*). *Citizenship education* sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga Negara muda yang paham akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui persekolahan.

Sistem pendidikan Indonesia mengatur bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa

kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Hal tersebut dapat kita temui dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a) Pendidikan Agama, b) Pendidikan Kewarganegaraan, c) Bahasa...” dan “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a) Pendidikan Agama; b) Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa”. Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Adanya ketentuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran/mata kuliah ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 ayat 2 UU Sistem Pendidikan Nasional).

Dalam dunia pendidikan, berkebutuhan khusus merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kekurangan, yang tidak dialami oleh anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus (*children with special needs*) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi atau fisik. Anak dengan kebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami kelainan/penyimpangan fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya.

ABK terdiri dari beberapa tipe antara lain: Tunanetra, adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*Blind*) dan *low vision*. Definisi Tunanetra menurut Kaufman & Hallahan adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indra penglihatan maka proses pembelajaran menekankan pada alat indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Adapun ciri-ciri Anak Tunanetra adalah sebagai berikut: Tidak mampu melihat, Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter, Kerusakan nyata pada kedua bola mata, Sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan, Mengalami kesulitan mengambil benda kecil didekatnya, Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/bersisik/kering,

Pandangan hebat pada kedua bola mata, Mata yang bergoyang terus

Tunarungu, adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu menggunakan bahasa isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Saat ini diberberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak. Adapun ciri-ciri Anak Tuna Rungu adalah sebagai berikut: Secara nyata tidak mampu dengar, Terlambat perkembangan bahasa, Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, Kurang/tidak tanggap bila diajak bicara, Ucapan kata tidak jelas, Kualitas suara aneh/monoton, Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, Banyak perhatian terhadap getaran, dan Keluar cairan “nanah” dari kedua telinga

Tuna Grahita (Retardasi Mental), anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata, atau disebut dengan keterbelakangan mental atau retardasi mental karena keterbatasan keerdasannya mengakibatkan dirinya sukar mengikuti program pendidikan di sekolah biasa, oleh karena ini tunagrahita membutuhkan pendidikan yang memiliki layanan seara khusus yakni disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Terbagi menjadi 1) Tunagrahita ringan, disebut juga *moron* atau *debil*, Kelompok ini memiliki IQ antara 69-55. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. 2) Tunagrahita sedang Anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 54-40 menurut Skala Weschler (WISC). Anak terbelakang mental sedang dapat dididik mengurus diri sendiri. 3) Tunagrahita berat, Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut dengan idiot. Kelompok ini memiliki IQ antara 39-25 menurut Skala Weschler (WISC) dan yang sangat berat memiliki IQ dibawah 24. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain.

Tunadaksa, berarti suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya sehingga menghambat kegiatan individu untuk menjalankan aktivitas yang normal. Klasifikasi anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Tunadaksa ortopedi adalah anak tunadaksa yang mengalami kelainan,

kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot, tubuh, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal.

Tunadaksa saraf adalah anak tunadaksa yang mengalami kelainan akibat gangguan pada susunan syaraf di otak. Luka pada bagian otak tertentu, efeknya penderita akan mengalami gangguan dalam perkembangan, mungkin akan berakibat ketidakmampuan dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Salah satu bentuk kelainan yang terjadi pada fungsi otak dapat dilihat pada anak *cerebral palsy* (CP). *Cerebral palsy* yaitu gangguan aspek motorik yang disebabkan oleh disfungsi otak. Dengan terganggunya fungsi motorik, sebagaimana yang dialami anak penderita *cerebral palsy*, rentetan kesulitan berikutnya kemungkinan dapat mempengaruhi kesulitan belajar, masalah-masalah kejiwaan, kelainan sensoris, kejang-kejang, maupun penyimpangan perilaku yang bersumber pada fungsi organ tubuhnya.

Tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku disekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan. Adapun ciri-ciri Anak Tuna Laras adalah: Cenderung membangkang, Mudah terangsang emosinya/emosional/mudah marah, Sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu dan Sering bertindak melanggar norma sosial/norma susila/hukum

Anak Lambat Belajar, adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mereka mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan tunagrahita, lebih lambat dibanding dengan yang normal. Mereka butuh waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak lambat belajar terdiri dari : Gangguan Matematika (*Diskalkulia*), Gangguan matematika menggambarkan anak-anak dengan kekurangan kemampuan aritmetika. Mereka dapat memiliki masalah memahami istilah-istilah matematika dasar seperti operasi penjumlahan dan pengurangan, memahami simbol-simbol matematika, atau belajar tabel perkalian. Mungkin masalah ini tampak sejak anak duduk di kelas 1 SD (6 tahun) tetapi umumnya tidak dikenali sampai anak duduk di kelas 2 atau 3 SD.

Gangguan Menulis (*Disgrafia*), Gangguan menulis mengacu pada anak-anak dengan keterbatasan pada

kemampuan menulis, seperti kesalahan mengeja, tata bahasa, tanda baca, atau kesulitan dalam bentuk kalimat dan paragraf. Kesulitan menulis yang parah umumnya tampak pada usia 7 tahun (kelas 2 SD), walaupun kasus-kasus yang lebih ringan mungkin tidak dikenali sampai usia 10 tahun (kelas 5 SD) atau setelahnya.

Gangguan Membaca (*Disleksia*), Gangguan membaca atau *disleksia* mengacu pada anak-anak yang memiliki perkembangan keterampilan yang buruk dalam mengenali kata-kata dan memahami bacaan. Anak-anak yang menderita *disleksia* membaca dengan lambat dan kesulitan. Mereka mengubah, menghilangkan, atau mengganti kata-kata ketika membaca dengan keras. Mereka memiliki kesulitan menguraikan huruf-huruf dan kombinasinya serta mengalami kesulitan menerjemahkannya. Mereka mungkin juga salah mempersepsikan huruf-huruf seperti jungkir balik, contohnya bingung antara huruf W dengan M. *Disleksia* biasanya tampak pada usia 7 tahun, bersamaan dengan kelas 2 SD, walaupun sudah dikenali pada usia 6 tahun.

Ciri-ciri dari anak yang mengalami *slow learner* : Fungsi kemampuan di bawah rata-rata pada umumnya, Memiliki kecanggungan dalam kemampuan menjalin hubungan intrapersonal, Memiliki kesulitan dalam melakukan perintah yang bertahap, Tidak memiliki tujuan dalam menjalani kehidupannya, Memiliki berbagai kesulitan internal seperti : keterampilan mengorganisasikan dan menyimpulkan informasi, Memiliki skor yang rendah dengan konsisten dalam beberapa tes, Memiliki pandangan mengenai dirinya yang buruk, Mengerjakan segalanya secara lambat, Lambat dalam penguasaan terhadap sesuatu, Kesulitan Belajar

*Low Vision*, adalah seseorang yang memiliki penglihatan jauh, tetapi masih mungkin dapat melihat obyek dan benda-benda yang berada pada jarak beberapa tertentu. *Low vision* adalah seseorang yang mengalami kelainan penglihatan sedemikian rupa tetapi masih dapat membaca huruf yang dicetak besar dan tebal baik menggunakan alat bantu penglihatan maupun tidak. Seseorang yang menderita *low vision* kondisi penglihatan yang masih mengalami kesulitan untuk melihat meskipun sudah menggunakan kacamata ataupun tidak terbantu dengan kacamata. Mereka yang mengalami kelainan penglihatan sedemikian rupa tetapi masih dapat membaca huruf yang dicetak besar dan tebal baik menggunakan alat bantu penglihatan maupun tidak.

Dalam menerima pendidikan ABK juga mempunyai kurikulum tersendiri. Dimana kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang didalamnya menampung pengaturan tentang tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Selain kurikulum perangkat lain yang menjadi komponen pembelajaran anak ABK adalah silabus, dimana silabus merupakan rancangan pembelajaran yang



disusun oleh guru selama satu semester. Sedangkan RPP sebagai rencana pembelajaran yang di susun guru untuk satu atau bebrapa pertemuan dengan peserta didik.

Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Bagi SLB, struktur dikembangkan untuk anak berkelainan fisik, emosi, mental, dan / atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran.

Muatan kurikulum di (SLB) sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kurikulum Kelompok I dapat digunakan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa disertai dengan intelektual dibawah rata-rata, sedangkan kurikulum kelompok II bagi anak berkebutuhan khusus dengan kemampuan intelektual dibawah rata-rata.

Ada beberapa kajian teori mengenai pembelajaran ABK salah satunya adalah teori Jean Piaget. Pengaruh Piaget terhadap pendidikan dan psikologi sangat dalam, terlebih-lebih pada masa dua dekade terakhir. Karenanya teori Piaget tentang perkembangan kognitif anak berkelainan saat ini telah menjadi konsep pendidikan yang tidak dapat diabaikan. Teori Piaget menetapkan kerangka kerja fungsional untuk melakukan tinjauan terhadap perkembangan kognitif perseorangan yang mempunyai hambatan dalam perkembangan mental, social, fisik, dan intelegensi.

Piaget menegaskan prinsip dasar dari perkembangan kognitif sesungguhnya serupa dengan apa yang ada dalam perkembangan biologis. Adaptasi dan pengorganisasian lingkungan merupakan proses yang tidak terpisahkan dan merupakan mekanisme tunggal dari aspek internal yang melakukan adaptasi berdasarkan aspek eksternal. Lebih lanjut ia menyatakan kegiatan intelektual tidak dapat dipisahkan dari “keseluruhan” keberfungsian kehidupan seseorang.

Keberfungsian intelektual merupakan bentuk khusus dari kegiatan yang bersifat biologis dan merupakan proses secara menyeluruh dimana kehidupan seseorang saat melakukan adaptasi terhadap lingkungan berpegang pada seluruh hasil pengalaman-pengalamannya.

Perkembangan kognitif sering terjadi sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Untuk itu dalam rangka memperoleh konsep atau pengertian, melalui inderanya individu senantiasa berhubungan dengan lingkungannya. Sekalipun masing-masing indera mempunyai sifat dan karakteristik yang khas, namun dalam bekerjanya memerlukan kerjasama dan keterpaduan diantara indera-indera tersebut. Sehingga memperoleh pengertian atau makna yang lengkap dan utuh tentang objek dilingkungannya.

Diperlukan kerjasama secara terpadu dan serentak antara indera penglihatan, pendengaran, pengecap, perabaan, dan pembau atau penciuman untuk mendapatkan pengenalan, pengertian, atau makna yang lengkap dan utuh tentang lingkungannya. Atas dasar ini, adanya hambatan-hambatan dalam penginderaan sebagaimana yang terjadi pada anak-anak berkelainan, diperkirakan berdampak kepada perkembangan kognitifnya.

Keterbatasan kognisi Anak Berkebutuhan Khusus disini tidak selamanya bersifat genetik, tetapi dapat juga sebagai dampak keterbatasan guru memberi stimulus pada peserta didik ABK. Oleh karena itu seorang guru Pendidikan Khusus harus bijaksana dalam memahami bahwa interaksi yang terus-menerus antar individu dengan individu lain atau antar individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi adalah sangat dibutuhkan dalam aktivitas belajar siswa.

## METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. dengan metode tersebut diharapkan mampu memberikan data dan gambaran (deskripsi) yang jelas dan lengkap dengan deskripsi yang komprehensif tentang Pelaksanaan pembelajaran PPKn bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini dilakukan di Subyek penelitian ini di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo. Alasan peneliti memilih sekolah ini karena peneliti menganggap pada sekolah ini terdapat hal menarik yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti. Selain itu, sekolah ini merupakan satu dari dua SLB Negeri yang terlengkap di area Surabaya-Malang. Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penlitian ini adalah Observasi Berperan Serta (*participant observation*) dan Wawancara (*interview*).

Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing / verification* (kesimpulan) (Sugiyono, 2011: 245). *Pertama*, reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. *Kedua*, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif. *Ketiga*, verivikasi / kesimpulan yang berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada. Jadi kesimpulan adalah berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

Untuk menjamin keabsahan data temuan yang diperoleh peneliti menanyakan langsung kepada obyek, peneliti juga berupaya mencari jawaban dari sumber lain.

(Bungin, 2004:99) menyatakan “keabsahan data dilakukan untuk meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik kehadiran peneliti di lapangan, observasi mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori), pembahasan dengan sejawat melalui diskusi, melacak kesesuaian hasil dan pengecekan anggota”. Untuk memperoleh keabsahan data, teknik yang penulis gunakan adalah: Triangulasi, Menggunakan bahan Refrensi, Member Check

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam kegiatan pembelajaran PPKn ada bermacam hambatan yang dialami guru,. tidak hanya dari keterbatasan yang dimiliki siswa atau sarana prasana saja dari pihak guru pun terdapat hambatan yang terkadang berpengaruh pada kemajuan siswa. Latar belakang lulusan bukan dari jurusan PPKn membuat guru mengalami kesulitan ketika menyampaikan materi lebih mendalam. Karena pada dasarnya guru lebih menguasai menajamen kelas dan ketunaan siswa, sedang dalam penguasaan materi yang lebih mendalam informan kurang menguasai.

Guru memang hanya menjelaskan materi secara dasar saja. Penjelasan yang diberikan guru terhadap siswa terkesan singkat. Meskipun siswa yang diajar adalah anak dengan kelainan lambat berfikir. Tidak seharusnya guru hanya menjelaskan secara singkat, tapi kembali lagi pada latar belakang pendidikan guru yang dasarnya memang kurang menguasai materi secara rinci dan mendalam. Disini tentu akan berdampak pada kemajuan akademik siswa, karena siswa hanya mendapat informasi yang sedikit dari apa yang dipelajari.

Guru kelas pun tidak dapat menjelaskan lebih banyak, selain karena pemahaman materi yang kurang menguasai jam pelajaran yang singkat juga membuat guru kekurangan waktu jika ingin menjelaskan lebih dalam dan terperinci. Pada kelas VIII SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo ini, mata pelajaran PPKn hanya mendapat dua jam pelajaran dalam satu minggu. Dua jam pelajaran itupun harus terpotong kegiatan berdoa dan absensi sebelum pelajaran dimulai. Belum lagi keadaan siswa tunagrahita yang *notabene* lamabat berfikir. Untuk menangkap satu materi pelajaran, guru harus menjelaskan secara universal dalam artian menjelaskan untuk satu kelas dan menjelaskan secara personal yakni menjelaskan materi secara individual atau *face to face*. Seperti yang dijelaskan oleh guru kelas Ibu Sri Tavip Hartini berikut ini:

“ Gimana yah mbak... Saya kan lulusan Pendidikan Luar Biasa jadi kalau disuruh mengajar materi lebih dalam itu kurang bisa. Misalnya kayak hari ini tadi kan mbak

mengajarkan materi tentang Perangkat Kelurahan. Kalau mbak yang ngajar materi sampean menyampaikannya itu dengan jelas, rinci sampai Undang-undangnya juga. Nah kalau saya... yah cuma dasarnya saja mbak, apa yang ada di buku yang sudah saya pilah sesuai kemampuan siswa saya itu yang saya sampaikan. Hanya dasarnya tidak bisa sampai jelas. Sebenarnya SLB ini butuh guru lulusan jurusan murni kayak sampean gini loh mbak.”

Anak tunagrahita merupakan anak dengan tingkat kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau lebih sering disebut keterbelakangan mental atau retardasi mental. Karena keterbatasan kecerdasannya tersebut membuat anak tunagrahita sukar dalam mengikuti pelajaran atau program pendidikan pada sekolah biasa. Seperti hal nya dengan para siswa kelas VIII tunagrahita SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo. Kelas yang disebut dengan kelas VIII-C (dalam klasifikasi ketunaan, tunagrahita disebut dengan C) ini, memiliki empat siswa dalam satu kelasnya. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, bahwa dalam satu kelas SLB hanya terdapat empat siswa saja. Kebijakan ini ditujukan karena siswa memiliki ketunaan dan butuh pelayanan yang khusus, selain itu ini juga memudahkan guru untuk mendidik. Dengan jumlah siswa yang sedikit tentunya guru lebih mudah menangani secara personal kebutuhan siswanya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itulah dalam satu kelas hanya dibolehkan terdiri dari empat siswa.

Untuk kelas VIII tunagrahita SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo, empat siswa tersebut terdiri dari tiga orang siswa perempuan dan satu orang siswa laki-laki. Semua siswa dikelas ini mengalami tunagrahita, mereka sama-sama memiliki masalah keterlambatan berfikir. Keempat siswa ini memiliki tingkat ketunaannya masing-masing, dari empat siswa tiga diantaranya mengalami tunagrahita ringan dan satu lainnya mengalami tunagrahita ringan.

Langkah-langkah yang dilakukan sekolah sebelum melakukan penyusunan RPP ialah melakukan musyawarah dengan komite sekolah maupun orang tua murid mengenai layanan yang akan diberikan kepada siswa ABK. Kemudian anak diberikan tes IQ, hasil tes tersebut digunakan untuk menentukan apakah siswa tersebut memiliki intelegensi rata-rata, di atas rata-rata, atau dibawah rata-rata dan kebutuhan khusus apa yang diderita siswa. Hasil ini juga digunakan dalam pertimbangan memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut. Hal tersebut sangat penting karena guru dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai. Sebagaimana hasil wawancara bersama GPK kelas VIII (Guru Pendamping Kelas) ibu Sri Tavip Hartini, M.MPdberikut :



“... langkah-langkah yang perlu ditempuh yaitu identifikasi, assesment atau pengukuran selanjutnya guru baru mulai mendesain program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi, melalui beberapa langkah tadi guru tidak sembarangan dalam memberikan pembelajaran bagi ABK”.

Hasil tes tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk menentukan apakah siswa tersebut memiliki intelegensi rata-rata, di atas rata-rata, atau dibawah rata-rata. Hasil ini juga dapat digunakan dalam pertimbangan memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut. Hal tersebut sangat penting karena sebagai guru hendaknya memahami kondisi individu siswa, dengan mengetahui kondisi individual siswa, guru dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai.

Dalam penyusunan rencana pembelajaran di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo Guru Pendidikan Kewarganegaraan menyusun rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP), penjabaran materi, menentukan strategi dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran, penentuan cara penilaian dan hasil belajar, dan setting lingkungan pembelajaran.

Kurikulum yang dipakai dalam proses pembelajaran adalah kurikulum khusus ABK. Dimana kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang berpatokan pada kurikulum nasional. Isi dari kurikulum ABK sendiri sama dengan kurikulum reguler (kurikulum anak normal), hanya saja dalam kurikulum ABK Kompetensi dan materi yang ada lebih di ringkas. Semisal dalam kurikulum reguler mata pelajaran PPKn Kompetensi Inti 1 memiliki empat Kompetensi Dasar, maka pada kurikulum ABK Kompetensi Inti 1 di ringkas menjadi 2 Kompetensi Dasar.

Semisal dalam kurikulum reguler mata pelajaran PPKn Kompetensi Inti 1 memiliki empat Kompetensi Dasar, maka pada kurikulum ABK Kompetensi Inti 1 di ringkas menjadi 2 Kompetensi Dasar. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Guru Kelas Tunagrahita sekaligus Guru Mata Pelajaran PPKn ibu Sri Tavip Hartini, M.MPd berikut :

“Kurikulum yang dipakai ya tidak sama dengan kurikulum sekolah normal mbak. Disini memakai kurikulum untuk anak ABK yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Kalau ditanya apa kurikulumnya K-13? Yah... memang memakai K-13, Cuma saya kalau mengajar tetep pakai caranya kurikulum KTSP. Kalau saya pakai seperti K-13, kasihan anak-anak mbak. Mereka kesulitan

mengikutinya, lhawong kurikulum KTSP saja mereka masih kesulitan gimana yang 2013?”

Kurikulum ABK juga mengikuti setiap perubahan kurikulum yang ditetapkan dan dipakai oleh sistem pendidikan. Saat ini kurikulum yang dipakai di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo merupakan kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berpusat pada siswa, siswa dituntut lebih aktif selama proses pembelajaran. Hanya saja dalam pelaksanaannya guru masih cenderung menggunakan sistem tematik dari kurikulum 2006 (KTSP). Dimana pada dasarnya kurikulum KTSP gurulah yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Guru Kelas ibu Sri Tavip Hartini, M.MPd berikut :

“Meskipun kurikulum yang dipakai K-13, dalam praktek mengajarnya saya masih menggunakan caranya kurikulum KTSP, selain karena kondisi siswa yang kurang mendukung bukunya juga masih minim mbak. Kurang malahan, seharusnya pemerintah itu kalau mau menetapkan kurikulum baru harus mempersiapkan segalanya dulu baru diterapkan. Jangan kayak gini mbak, kurikulumnya sudah jalan tapi sarana prasarana pendukungnya belum siap. Masak buku saja cuma dapat satu untuk pegangan guru. Siswanya nggak dapet buku, gimana siswa saya mau pinter? Saya sudah usaha cari bukunya, tapi sampean tahu sendiri kan mbak. Buku untuk anak ABK itu sulit nggak semudah buku pelajaran untuk anak reguler. Kalaupun ada yah dapat dari pemerintah itu”

Karena alasan tersebut K-13 dianggap kurang cocok dengan keadaan siswa SLB yang rata-rata adalah siswa dengan ketunaan. Sementara K-13 merupakan kurikulum yang pelaksanaannya siswa dituntut lebih aktif dan dominan dibanding guru. Tentunya ini berbanding terbalik dengan kondisi siswa SLB yang membutuhkan guru lebih aktif dan dominan dalam pembelajaran, mengingat mereka adalah anak-anak yang memiliki ketunaan (hambatan).

Buku-buku yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran PPKn pada kelas VIII tunagrahita juga merupakan buku yang disusun untuk K-13. Namun untuk buku pelajaran PPKn, pihak guru masih mengalami kesulitan dikarenakan buku ajar yang digunakan hanya satu. Dipegang oleh guru, sementara para siswa tidak mendapatkan buku. Informan juga menuturkan jika kecewa dengan kebijakan pemerintah yang merubah kurikulum tanpa persiapan yang matang dulu. Akibatnya

seperti saat ini, para siswa tunagrahita kelas VIII disini masih belum memiliki buku siswa. Padahal untuk kondisi mereka yang demikian, buku sangatlah berperan penting sebagai alat belajar mereka ketika jam sekolah selesai.

Setiap kali pertemuan guru menggunakan RPP dalam kegiatan belajar mengajar. Keberadaan RPP sangat membantu guru dalam penyampaian materi, karena anak yang mereka hadapi adalah anak berkebutuhan khusus sehingga memerlukan strategi dan perencanaan yang matang. Seperti perencanaan pada umumnya, setiap guru wajib membuat (RPP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Penyusunan RPP di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo dimodifikasi bahan ajarnya agar sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Penyusunan RPP sesuai dengan silabus hanya saja bahan ajar dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan ABK agar dapat mengikuti pelajaran di kelas dengan mudah. Modifikasi bahan ajar pada siswa ABK di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo dibuat sesuai dengan ketunaan dari masing-masing kelas yang diajar.

Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru. Pengertian lain ialah teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas baik secara individu atau secara kelompok, agar pelajaran itu dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik.

Dalam menentukan strategi dan metode pembelajaran guru akan memilih strategi dan metode yang dapat diterapkan untuk ABK. Penyampaian strategi maupun metode telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, sehingga saat penyampaian materi ABK dapat menerimanya dengan baik. Salah satu metode yang dipilih guru untuk pembelajaran PPKn adalah metode ceramah, metode ceramah disini merupakan metode yang dilakukan guru secara monolog dan hubungan satu arah. Langkah-langkah yang dilakukan guru adalah sebagai berikut:

Tahap Persiapan, pada tahap ini guru terlebih dahulu merumuskan tujuan yang ingin dicapai pada jam pelajaran yang akan berlangsung. Kemudian guru akan menentukan materi pokok yang akan diceramahkan. Guru akan memilih materi yang sesuai dengan anak tunagrahita sebelum melaksanakan ceramah. Jika dirasa materi memerlukan alat bantu, maka guru akan mempersiapkan alat bantu.

Tahap Pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan dimulai oleh guru dengan membuka proses pembelajaran terlebih dahulu. Guru akan membuka pembelajaran dengan berdoa dan membaca surat pendek. Kemudian guru mulai membacakan bab apa yang akan dibahas selama jam pembelajaran berlangsung. Selanjutnya guru akan

menjelaskan materi kepada siswa secara universal dan personal. Jika dirasa siswa sudah mampu memahami materi, guru akan memberikan beberapa latihan untuk mengukur daya ingat dan pemahaman siswa. Terakhir guru akan mengulang materi secara ringkas kemudian menutup jam pembelajaran dengan berdoa dan tugas mempelajari bab selanjutnya.

Sekolah yang ideal adalah sekolah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Adapun sarana yang digunakan dalam pembelajaran PPKn antara lain ruang kelas, buku-buku yang terkait dengan PPKn, video, TV, VCD, serta hal-hal yang dapat digunakan sebagai media/sarana dalam pembelajaran.

Penilaian dalam pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan atau sebagai kontrol pelaksanaan program mengajar. Hasil pembelajaran PPKn merupakan alat ukur baik atau buruknya pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau belum sesuai. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan. Adapun cara penilaian pembelajaran PPKn yang diterapkan di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo antara lain dengan cara tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan.

Proses pembelajaran PPKn adalah suatu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan di kelas. Pelaksanaan pembelajaran PPKn di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo hampir sama dengan sekolah reguler pada umumnya, kurikulumnya relatif sama dengan kurikulum di sekolah umum, hanya dibatasi pada jumlah materinya. Materi yang diajarkan di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo menggunakan penyesuaian materi dari Departemen Pendidikan Nasional untuk ABK yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar. Langkah-langkah yang dilakukan guru PPKn dimulai dari tahap Pra-Intruksional, Intruksional dan Penutup. Seperti yang diungkapkan ibu Sri Tavip Hartini, M.MPd. :

“Materi yang diajarkan di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo kurang lebih sama dengan materi diterapkan di sekolah reguler pada umumnya. Soalnya kegiatan pembelajaran di sekolah ini dalam proses pembelajarannya tidak berbeda dengan sekolah normal”.

Pra Intruksional, pada tahap ini sebelum pelajaran dimulai dengan doa pembukaan yaitu basmalah dan surat-surat pendek, di lanjutkan dengan guru melakukan absensi, selanjutnya guru memberikan apersepsi. Instruksional, tahap ini merupakan tahap inti dari serangkaian aktifitas pembelajaran yang dilakukan guru

dengan peserta didik dalam mencapai suatu tujuan yang termuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran guru PPKn melakukan pendekatan dengan peserta didik serta menggunakan beberapa metode, tahapannya sebagai berikut:

*Pertama*, Pada pembelajaran PPKn kelas VIII tunagrahita SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo, strategi belajar mengajar pun diperlukan oleh guru kelas untuk menjalankan proses pembelajaran PPKn. Disini pelaksanaan pembelajaran PPKn dilaksanakan selama 2 jam (satu kali pertemuan) dalam seminggu. Dalam melaksanakan pembelajaran PPKn, sebelumnya guru harus menyiapkan materi yang akan di ajarkan dan memilih strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Biasanya guru kelas akan lebih dulu memilah dan memiliki materi yang ada dibuku sebelum mengajarkannya pada siswa. Hal ini dilakukan karena tidak semua materi yang ada di buku PPKn kurikulum 2013 mampu dicerna siswa, mengingat para siswa adalah anak tunagrahita.

*Kedua*, Selanjutnya barulah guru menyampaikan materi yang sudah dipilah tersebut kepada siswa. Dalam proses menjelaskan materi ini, guru harus menjelaskan secara *universal* dan *personal*. Guru akan lebih dahulu menjelaskan kepada seluruh siswa kelas secara bersamaan. Selanjutnya guru akan mulai melempar pertanyaan-pertanyaan pada siswa untuk mengukur seberapa jauh mereka telah paham materi yang dijelaskan. Kemudian guru akan mengulang menjelaskan bagian yang dianggap belum dimengerti siswa. Biasanya guru perlu mengulang antara 3-4 kali menerangkan sampai siswa dianggap paham.

Selain itu guru akan menjelaskan secara personal setelah memberi soal uji coba terhadap siswa. Penjelasan secara personal ini dilakukan dikarenakan siswa tunagrahita perlu bimbingan khusus untuk mencapai fokus dan paham terhadap materi. Mereka harus dituntun secara perlahan untuk mengingat dan memahami materi yang disampaikan.

Disini peneliti mengamati penyampaian materi secara personal oleh guru terhadap siswa bernama Rahayu. Guru harus berbicara *face to face* kepada Rahayu untuk menyampaikan materi. Guru harus berkali-kali memanggil nama Rahayu untuk membuatnya fokus dan mendengarkan penjelasan guru. Guru bahkan harus mendektekan materi yang ditulis di papan untuk Rahayu agar catatannya benar dan dapat dipelajari dirumah.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, didapatkan hasil dimana siswa tunagrahita kurang berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Tidak ada siswa yang aktif bertanya dalam kelas ketika guru menjelaskan materi atau ketika guru membuka sesi

pertanyaan untuk materi yang kurang jelas. Tampak guru yang lebih aktif untuk bertanya pada siswa dibandingkan dengan siswa yang memberi pertanyaan pada guru.

*Ketiga*, guru memberikan contoh yang mudah dipahami dengan mengambil contoh dari sekitar. Seperti hari itu yang menjelaskan materi tentang “Kelurahan”, guru harus menjelaskan seperti apa lurah itu apa tugasnya dengan memberi contoh lurah di tempat tinggal siswa, karena siswa akan lebih mudah mengingat sesuatu yang tidak asing untuknya.

*Keempat*, Untuk media dan metode yang digunakan guru dalam pembelajaran PPKn tergantung dengan KD apa yang akan dibahas. Biasanya guru menggunakan metode Kooperatif dengan model pembelajaran tematik. Pemilihan model pembelajaran tematik ini dilakukan, dikarenakan siswa tunagrahita pola berfikirnya masih seperti anak dibawah umurnya (intelektualnya lambat) sehingga model ini dianggap cocok. Pembelajaran tematik umumnya memang digunakan untuk pendidikan usia dini atau sekolah dasar. Ini dikarenakan pembelajaran tematik menitik beratkan pada tema yang akan dibahas. Pembelajaran bergantung kepada objek-objek konkret yang ada dan mudah dikenali. Selain itu peserta didik akan lebih mudah memusatkan pada suatu tema tertentu dan sesuai dengan kurikulum 2013.

Penutup, pada tahap ini guru PPKn memberikan penguatan atau kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah disampaikan. Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri guru memberikan beberapa pekerjaan rumah kepada siswa. Kemudian, pembelajaran diakhiri dengan membaca doa bersama-sama.

Selain pembelajaran guru juga melakukan evaluasi pada setiap kompetensi yang sudah dicapai oleh siswa. Evaluasi merupakan alat untuk mengukur sampai di mana kemampuan anak didik menguasai materi yang telah diberikan. Evaluasi dapat dijadikan oleh pihak sekolah sebagai bahan introspeksi diri, dengan melihat sejauh mana kondisi belajar yang diciptakannya. Berikut petikan wawancara dengan kepala sekolah bapak Drs. Suhermanto, M.Pd. :

“Evaluasi yang dilakukan seperti evaluasi pada umumnya mbak. Evaluasi yang dilakukan di sekolah normal/ reguler kan ada program remedial untuk anak yang belum mencapai standar minimal yang ditetapkan. Hal tersebut sama dengan yang disini mbak. Jadi... guru memantau anak secara terus menerus, sehingga kita tahu perkembangannya sejauh mana dan program yang diberikan berhasil atau tidak”.



Peran evaluasi sangat penting agar pembelajaran efektif. Di samping berguna untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa, juga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk perencanaan pembelajaran berikutnya. Hasil evaluasi dapat menggambarkan siswa yang telah mencapai maupun yang belum mencapai standar kompetensi minimal yang ditetapkan sekolah. Siswa yang sudah mencapai kompetensi diadakan pengayaan sedangkan siswa yang belum mencapai standar kompetensi minimal diadakan remedial. Siswa berkebutuhan khusus juga mengikuti ujian seperti siswa pada sekolah reguler umumnya. Seperti kutipan wawancara dengan salah satu siswa tunagrahita bernama Aulia Novita Sari dibawah ini:

“Saya ujiannya sama kayak temen-temen saya disekolah normal kok mbak, pas ulangan saya juga ulangan, pas UTS saya juga UTS bareng temen-temen. Kalau temen-temen saya yang sekolah normal cerita soalnya susah, saya juga ngerasa soalnya susah kok hehehe ...”.

Selain itu Aprilia Windasari yang juga siswa kelas VIII Tunagrahita SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo juga mengatakan:

“Dulu pas UNAS saya juga UNAS kok mbak, temen-temen dirumah yang sekolah biasa UNAS saya juga. Tapi nggak tau sama nggak soale mbak”.

Guru Kelas sekaligus guru PPKn ibu Sri Tavip Hartini, M.MPd. juga menjelaskannya dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Anak tunagrahita juga mengikuti tes akhir semester maupun UAN sama seperti anak lainnya kok mbak. Nggak dibedakan sama anak normal lainnya. Kita gurunya kan juga butuh nilai buat lihat perkembangan mereka, kalau nggak ada ujian gimana nilainya? Gimana mau naik kelasnya?”

Dari petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo mengikuti ujian yang sama dengan anak lain. pelaksanaan ujian maupun tes tersebut dilakukan untuk mengevaluasi akademik dan kemajuan perkembangan siswa terhadap pelajaran yang diberikan. Hasil dari ujian tersebut nantinya juga sebagai nilai yang akan membawa siswa naik kelas selanjutnya atau tidak.

## Pembahasan

Dalam pelaksanaan PPKn bagi ABK pastilah pembelajaran tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya upaya yang mendukung terlaksananya pembelajaran. Adapun upaya tersebut antara lain: Memberikan penjelasan dan bimbingan dalam menjelaskan materi PPKn secara personal kepada siswa tunagrahita sampai siswa dianggap mampu dan paham. Penjelasan materi secara universal merupakan bentuk penjelasan guru terhadap siswa secara bersamaan (penjelasan untuk satu kelas). Sementara penjelasan secara personal merupakan penjelasan oleh guru untuk siswa secara individual. Guru akan menjelaskan pada masing-masing individu siswa.

Dalam pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan bagi ABK pastilah pembelajaran tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya upaya yang mendukung terlaksananya pembelajaran. Berikut petikan wawancara dengan Suyono, M.MPd. selaku ketua bidang kesiswaan :

*“Dari sarana dan prasarana Alhamdulillah selalu di upayakan agar mendukung. Selain itu komite sekolah juga sangat mendukung mbak. Lalu dari pihak orang tua juga sangat mendukung, setiap diundang ke sekolah untuk musyawarah itu semua orang tua selalu datang mbak...”*

Selain itu guru kelas sekaligus guru PPKn dari anak tunagrahita kelas VIII juga menyatakan :

*“Kalau upaya banyak mbak, nggak dari saya dan pihak sekolah saja, dari para orang tua siswa juga banyak kok mbak. Kalau dari saya sendiri yah kayak Memberikan penjelasan dan bimbingan dalam menjelaskan materi PPKn”*

Dari petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo juga mendapatkan upaya pendukung baik dari pihak guru, sekolah maupun orang tua. Adapun upaya tersebut antara lain: Menjelaskan secara berulang dengan perlahan, karena siswa tunagrahita susah untuk fokus pada sesuatu. Penjelasan ini dimaksudkan agar siswa tunagrahita mendapat stimulus terus menerus sehingga siswa terpancing untuk fokus pada materi yang dibahas oleh guru. dan tentunya siswa lebih mudah mengingatnya.

Memberi contoh yang dikenal dan sudah tidak asing bagi siswa saat menyampaikan materi PPKn. Pemberian contoh konkrit dan *real* untuk siswa tunagrahita ditujukan agar siswa mudah menangkap dan memahami contoh yang disampaikan oleh guru.

Melihat gambar atau video tentang materi yang dibahas, supaya siswa lebih mudah paham jika melihatnya secara langsung, tidak hanya melalui penjelasan. Pemberian gambar dan video biasanya diberikan oleh guru terhadap materi yang dianggap rumit dan membutuhkan visualisasi secara langsung. Visualisasi secara langsung memudahkan siswa tunagrahita mengingat. Sebelum memulai pelajaran PPKn guru terlebih dahulu menyortir materi mana yang sesuai dan dapat dimengerti siswanya. Guru akan menyortir atau memilah materi mana yang akan disampaikan sebelum pembelajaran dimulai. Pemilahan materi ini dikarenakan tidak semua materi dapat dipahami dengan mudah oleh siswa.

Dari pihak sekolahpun juga memiliki upaya dengan memberikan komputer pada setiap kelas, sehingga siswa dapat belajar melalui media dan referensi yang berbeda. Komputer diberikan pada setiap kelas yang ada, masing-masing kelas akan disediakan komputer untuk membantu pembelajaran berlangsung. Jika sewaktu-waktu guru memerlukan media tambahan untuk penyampaian materi. Memberikan materi kompensatoris berupa bina diri untuk anak tunagrahita. Agar dapat mengurus dirinya dengan baik dan bersosialisasi di tengah masyarakat tanpa minder. Dalam materi kompensatoris, siswa tunagrahita biasanya diajari untuk mengurus dirinya sendiri. Membersihkan dirinya, menggosok gigi, memakai hasduk, menyisir rambut dengan baik dan sebagainya.

Selain upaya yang dilakukan guru dan sekolah, terdapat hambatan yang memengaruhi pembelajaran PPKn di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo, hambatan tersebut antara lain : bentuk hambatan yang dialami guru saat melaksanakan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap anak tunagrahita kelas VIII SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo adapun hambatan tersebut sebagai berikut:

Karena siswa tunagrahita memiliki kekurangan dalam intelektual, sehingga meskipun guru menjelaskan secara personal butuh waktu lama untuk membuatnya mengerti. Sementara jam pelajaran hanya 2 jam, itu pun guru harus menjelaskan materi secara personal tidak hanya pada satu siswa. Meskipun guru sudah memberikan penjelasan secara personal namun masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Saat menjelaskan materi perlu menjelaskannya berulang kali sampai siswa paham dan mengerti. Namun guru harus bermasalah dengan jam pelajaran yang dirasa kurang. Jam PPKn pada siswa tunagrahita hanya dalam satu minggu hanya 2 jam setiap pertemuan. Penyediaan proyektor dan LCD yang kurang memadai, membuat guru harus bergantian memakai proyektor dan LCD.

Pada kurikulum 2013 membuat guru harus memilah materi yang harus disampaikan pada siswa. Selain itu guru sedikit kerepotan menerapkan K-13 kepada siswa tunagrahita, sehingga guru masih menggunakan cara mengajar kurikulum lama.

Untuk sarana prasarana meskipun pihak sekolah menyediakan sarana prasarana yang baik di kelas tunagrahita, seperti memberikan komputer tapi siswa tidak begitu menguasai, sehingga komputer hanya digunakan saat pelajaran TIK saja.

Selain upaya tersebut, sekolah juga memberikan materi kompensatoris, materi ini sangatlah perlu untuk siswa tunagrahita, hanya saja waktu pelajaran umum seperti PPKn menjadi lebih sedikit karena kebutuhan ABK tidak hanya pelajaran umum, tapi juga pelajaran khusus sesuai ketunaan mereka. Untuk mengatasi hambatan pembelajaran PPKn. Sekolah dan guru melakukan beberapa solusi mengatasinya diantara adalah:

Keterlambatan berfikir dan susah mengingat materi oleh siswa tunagrahita memang sudah menjadi bawaan lahir dari mereka. Untuk mengatasi hambatan ini, guru mata pelajaran PPKn mengatasinya dengan memberikan penjelasan secara personal pada siswa tunagrahita.

Kurangnya jam pembelajaran PPKn untuk siswa tunagrahita, diatasi oleh guru kelas dengan memberikan tugas harian pada siswa. Sehingga di rumah siswa akan membuka kembali catatan dan materi yang disampaikan untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Penyediaan proyektor dan LCD yang kurang untuk visualisasi materi diatasi oleh guru dengan memberikan visualisasi melalui media lain. melalui gambar atau membawa benda yang berhubungan dengan materi misalnya

Kesulitan menerapkan kurikulum 2013 untuk menjelaskan materi PPKn diatasi guru dengan menjelaskan materi menggunakan cara kurikulum KTSP. Untuk Silabus, RPP, dan Bahan ajar masih menggunakan patokan dari kurikulum 2013.

Guru kurang menguasai komputer yang disediakan sekolah untuk mendukung pembelajaran PPKn. Untuk itu sekolah mengadakan pembelajaran komputer pada guru (*workshop*) agar guru dapat menggunakan komputer kelas secara maksimal dalam pembelajaran PPKn.

## Pembahasan

Ketidaksetaraan dalam pendidikan masih tetap menjadi sebuah kekhawatiran dan perhatian bagi semua negara, namun realitanya diskriminasi masih tetap menyebar di sekolah dan sistem pendidikan yang ada. Untuk mengatasi kesenjangan ini, sangat penting menumbuhkan kesadaran pada guru dan administrator pendidikan tentang pentingnya pendidikan, baik

pendidikan normal/reguler dan pendidikan khusus/inklusi. Pendidikan khusus/inklusi sendiri saat ini sudah marak dilaksanakan di Indonesia, pendidikan ini memungkinkan ABK untuk belajar layaknya anak normal lainnya. Dengan begitu ABK akan merasa tidak dibeda-bedakan sehingga diskriminasi terhadap ABK dapat dihilangkan.

Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam perencanaan pembelajaran dan pengorganisasian siswa berkebutuhan khusus. Tahapan tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut : (a) menetapkan bidang-bidang atau aspek problema belajar yang akan ditangani, apakah seluruh mata pelajaran, sebagian mata pelajaran atau hanya sebagian tertentu dari suatu mata pelajaran, (b) menetapkan pendekatan pembelajaran yang akan dipilih termasuk rencana pengorganisasian siswa, apakah bentuknya berupa pelajaran remedial, penambahan latihan-latihan di dalam kelas atau luar kelas, pendekatan kooperatif atau kompetitif, (c) menyusun program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual (PPI) disusun agar anak berproblema belajar/bermasalah mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka (Yusuf dkk, 2003:48).

Dari hasil penelitian di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo mengenai perencanaan pembelajaran PPKn sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum ada penyusunan program pembelajaran individual, dikarenakan kurangnya guru dan waktu pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sekolah sebelum melakukan penyusunan RPP ialah melakukan musyawarah dengan komite sekolah maupun orang tua murid mengenai layanan yang akan diberikan kepada siswa ABK serta sekolah bekerja sama atau meminta bantuan tenaga profesional di bidang psikologi agar anak dapat diberikan tes IQ.

Hasil tes tersebut nantinya dapat digunakan untuk menentukan apakah siswa tersebut memiliki intelegensi rata-rata, di atas rata-rata, atau dibawah rata-rata. Hasil ini juga dapat digunakan dalam pertimbangan memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut. Hal tersebut sangat penting karena sebagai guru hendaknya memahami kondisi individu siswa, dengan mengetahui kondisi individual siswa, guru dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai.

Dalam penyusunan rencana pembelajaran di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo Guru Pendidikan Kewarganegaraan menyusun rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP), penjabaran materi, menentukan strategi dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran, penentuan cara penilaian dan hasil belajar, dan setting lingkungan pembelajaran.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran PPKn di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo dapat terlaksana dengan baik jika ada perencanaan yang matang di setiap tahapannya, mulai dari identifikasi anak sampai pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajarannya itu sendiri. Mengetahui kesulitan belajar anak serta penetapan pendekatan pembelajaran merupakan modal utama dalam melaksanakan pembelajaran PPKn.

Seperti yang dijelaskan oleh Piaget bahwa "Keterbatasan kognisi Anak Berkebutuhan Khusus di sini tidak selamanya bersifat genetik, tetapi dapat juga sebagai dampak keterbatasan guru memberi stimulus pada peserta didik ABK." Karena itulah dalam praktek pembelajaran yang dilakukan pada anak tunagrahita, guru cenderung akan lebih sering memberi stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan memancing memori siswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Disamping itu guru juga memberikan stimulus kepada ABK dengan mengkondisikan kelas dan menata tempat duduk ABK diletakkan lebih dekat dengan tempat duduk guru, hal ini ditujukan agar guru lebih mudah memantau dalam proses pembelajaran. Guru juga sering mendekatinya dan memberikan pertanyaan. Sehingga nantinya ABK akan mendapat stimulus dari guru secara terus menerus.

Suppes (1974) juga menjelaskan bahwa kognisi merupakan bidang yang luas yang meliputi semua keterampilan akademik yang berhubungan dengan wilayah persepsi. Messen, Conger, dan Kagan (1974) menjelaskan bahwa kognisi paling sedikit terdiri dari lima proses, yaitu : (1) persepsi, (2) memori, (3) pemunculan ide-ide, (4) evaluasi, (5) penalaran.

Secara umum, perkembangan kognitif yang terjadi pada anak tunagrahita di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo hakekatnya sama seperti yang terjadi pada anak normal. Namun, untuk tahap berpikir yang sifatnya abstrak menjadi wilayah sulit yang dicapai. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa terjadinya keterbelakangan mental/rendah intelektual pada siswa disini dapat berdampak kepada terjadinya hambatan dalam satu atau beberapa proses kognitif seperti bahasa, persepsi, konsentrasi, memori, pemunculan ide-ide, evaluasi dan penalaran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ketika guru memberikan penjelasan materi PPKn secara berulang dan personal pada siswa, ternyata membentuk kondisi mental siswa lebih baik. Dimana hal ini memunculkan persepsi baik dan menyenangkan akan pembelajaran PPKn. Siswa dapat menerima dan mengingat materi yang disampaikan lebih banyak dan menyimpan materi yang disampaikan guru dalam memorinya lebih baik.

Menurut perspektif psikologi kognitif, belajar pada dasarnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa



behavioral (yang bersifat jasmaniah). Karena itulah pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo senantiasa disesuaikan dengan perkembangan anak dan tidak dapat dipaksakan (*fleksibel*). Belajar merupakan kepentingan peserta didik bukan kepentingan guru. Apabila pelaksanaan pembelajaran mengabaikan kemampuan yang dimilikinya maka besar kemungkinan di dalam dirinya tidak akan tumbuh keaktifan, motivasi, kreatifitas untuk berprestasi dalam belajarnya. Berdasarkan perkembangan dan kemampuan anak, maka pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran menjadi panduan yang harus digunakan dalam pembelajaran, karena di dalam rencana pembelajaran tersebut telah ditetapkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (Lapono dkk, 2008:131).

Pelaksanaan pembelajaran PPKn di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo merupakan implementasi RPP yang telah disusun sebelumnya. Dalam proses pelaksanaannya siswa berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang sama seperti siswa di sekolah normal umumnya. ABK dilibatkan langsung dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran PPKn di kelas menggunakan materi yang kurang lebih sama dengan sekolah umum lainnya

Adapun yang dilakukan pihak sekolah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran PPKn untuk anak berkebutuhan khusus yaitu dengan mengadakan jam tambahan untuk pelajaran sesuai ketunaan mereka. Program tersebut dilaksanakan setelah pulang sekolah, hal tersebut dilakukan untuk memberikan layanan individu kepada ABK agar dapat hidup layaknya anak normal lainnya meskipun mereka memiliki kekurangan.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran PPKn di sekolah SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya jarak bangku ABK di letakkan lebih dekat dengan guru agar guru lebih mudah memantau dalam proses pembelajaran. Selain itu, untuk mengoptimalkan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus pihak sekolah mengadakan jam tambahan untuk jam pelajaran sesuai ketunaan yang dilaksanakan setelah pulang sekolah dan salah satu mata pelajaran untuk anak tunagrahita adalah Bina Diri.

Setelah pelaksanaan pembelajarannya maka guru harus melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan akademik siswa. Evaluasi diterapkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, menemukan kelemahan-kelemahan baik yang berkaitan dengan materi, metode, media, ataupun sarana (Nizar, 2002:78). Evaluasi merupakan alat untuk

mengukur sampai dimana kemampuan anak didik menguasai materi yang telah diberikan. Evaluasi bisa dijadikan sekolah sebagai bahan introspeksi diri, dengan melihat sejauh mana kondisi belajar diciptakannya.

Evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo dilaksanakan seperti pada kelas reguler pada sekolah normal umumnya. Siswa ABK melaksanakan dan mendapatkan soal ujian yang sama seperti sekolah reguler umumnya. Dalam evaluasi diadakan pula remedial atau perbaikan. Setelah anak dievaluasi dan hasilnya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka guru mengadakan remedial.

Remedial diadakan oleh guru sebagai upaya perbaikan terhadap sesuatu yang dipandang masih belum mencapai apa yang diharapkan atau diarahkan kepada pencapaian hasil belajar yang optimal. Dengan diadakannya remedial tersebut maka diharapkan ada peningkatan prestasi sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Untuk pelaksanaan evaluasi akhir atau tes akhir semester dan/atau tes kenaikan kelas dan UAN, siswa ABK mengikuti ujian sama seperti ujian yang dilakukan anak normal umumnya, hanya saja media, bahan dan soalnya yang berbeda tingkatan dengan anak normal umumnya.

Dari hasil penelitian di kelas VIII tunagrahita SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa serta sebagai bahan untuk menyempurnakan perencanaan pembelajaran berikutnya. Evaluasi tengah semester, ujian kenaikan kelas maupun UAN dilaksanakan seperti pada sekolah reguler pada umumnya. Setelah anak dievaluasi dan hasilnya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka guru mengadakan remedial.

Untuk menciptakan pembelajaran PPKn yang baik dan terstruktur. Pihak sekolah beserta guru juga memberikan upaya-upaya guna membuat pembelajaran siswa tunagrahita lebih baik. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan guru antara lain dengan memberikan sarana prasarana pendukung pembelajaran PPKn seperti LCD dan proyektor sebagai media visualisasi. Pemberian jam tambahan untuk mata pelajaran kompenstoris, sebagai mata pelajaran khusus ketunaan siswa. Selain itu guru juga memberikan penjelasan materi secara personal, sebelum menjelaskan materi guru akan terlebih dahulu memilih materi yang sesuai dengan siswa tunagrahita.

## PENUTUP

### Simpulan

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bagi ABK di SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo dimulai dari tes IQ untuk mengukur kemampuan ABK, kemudian

guru mulai menyusun rencana pembelajaran PPKn bagi ABK. Selanjutnya guru mulai mendesain program perencanaan pembelajaran berdasarkan pada kemampuan awal ABK.

Perencanaan yang dilakukan guru PPKn sebelum pembelajaran yaitu menyusun RPP dan silabus, menentukan strategi dan metode, penyediaan sumber alat dan sarana prasarana, alat penilaian dan hasil belajar, dan setting lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Untuk pelaksanaan pembelajaran PPKn bagi ABK. Tahap pelaksanaan pembelajaran yaitu pra-intruksional berisi pembukaan, intruksional berisi penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup berisi kesimpulan Pelaksanaannya, untuk mengkondisikan kelas ABK duduk di bangku dekat dengan guru agar mudah dipantau dalam proses pembelajaran. Sehingga ABK akan dapat dengan mudah menerima stimulus (materi) yang diberikan guru selama pelajaran berlangsung. Evaluasi pembelajaran PPKn bagi ABK, adalah melalui pemantauan secara terus menerus terhadap kemajuan dan kemunduran belajar anak.

#### Saran

Bagi lembaga, SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo diharapkan lebih meningkatkan program yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga SLB Negeri Gedangan-Sidoarjo akan lebih berkembang lagi dimasa yang akan datang, serta dapat menghasilkan generasi penerus yang berkualitas, bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Hendaknya guru dapat memilih metode yang tepat dalam pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih optimal. Bagi peneliti lain, agar dapat meneliti pembelajaran ABK/inklusi dari substansi manajemen pendidikan yang lainnya atau tetap pada substansi yang sama akan tetapi pada latar penelitian yang berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 2003. *Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aqila Smart. 2010. *Anak Cacat Bukan Kiamat Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Katahati.
- Atmita Wardani. 2011. *Rasionalitas Konsumtif Mahasiswa Manajemen UNESA*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah Program Study Sosiologi Universitas Negeri Surabaya.
- Bakry Ms Noor. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Dikdik Baehaqi Arif. 2012. *Diktat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education*. Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan. Diakses pada 15 Januari 2016. Pukul 21.30 dari : <https://Baehaqiarif.Files.Wordpress.Com/2011/09/Diktat-2012-Copy.Pdf>
- Kamal Fuadi. 2011. Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Online: [http://eprints.ums.ac.id/28430/2/04\\_BAB\\_I.pdf](http://eprints.ums.ac.id/28430/2/04_BAB_I.pdf) (Diakses pada 15 November 2015. Pukul 22:35)
- M. Sukarjo, Ukim Komarudin. 2006 "Landasan Pendidikan" hal : 50
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Purwanti. 2011. Manajemen Pembelajaran Pai Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Di SDLB Negeri Salatiga). Diakses pada 15 November 2015. Pukul 23:27 dari : <http://digilib.uinsby.ac.id/8516/3/Bab.%20II.pdf>
- Rindi Lelly Anggraini. 2014. Proses Pembelajaran Inklusi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Kelas V Sd Negeri Giwangan Yogyakarta. Diakses pada 15 November 2015. Pukul 22:22 dari : <http://eprints.Uny.Ac.Id/8665/3/Bab%20%20-%2005401241022.Pdf>
- Sunardi. A 2000. *Ortopedagogik Umum II Anak Berkesulitan Belajar*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diakses pada 15 November 2015 dari : <http://sindiker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>
- Wina Sanjaya, 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Wood, Derek dkk. 2011. *Kiat Mengatasi Gangguan Belajar*. Jogjakarta: Kata Hati.